

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FUNGI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial  
Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh

**DWI RATNA NINGSIH  
NIM. 10675005101**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKAN BARU  
RIAU  
2010**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FUNGI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**



Disusun Oleh

**DWI RATNA NINGSIH  
NIM. 10675005101**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKAN BARU  
RIAU  
2010**

**FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTATOR PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR  
SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**DWI RATNA NINGSIH**

*Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan adalah pembinaan masyarakat desa, pembinaan perekonomian, menjaga ketertiban dan keamanan, mengadakan musyawarah, menyusun dan merancang peraturan desa. Oleh karenanya keberhasilan pembangunan Desa sangat tergantung kepada bagaimana dalam hal ini Kepala Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam menjalankan fungsinya sebagai Adimistator Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsinya tersebut di Desa Bajar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Data yang diambil dan diperoleh dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat yang berjumlah sebanyak 96 responden yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran angket, kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kebanyakan (46,84%) responden menjawab sudah sesuai dengan peraturan daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, walaupun begitu ada responden yang menilai belum sesuai sama sekali (0,42%) responden. Hambatan Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Administator Pembangunan adalah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembinaan yang diadakan, tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa dan kemauan masyarakat karena mereka sulit dikumpulkan dalam setiap pelatihan, banyaknya keinginan masyarakat dalam pembangunan sehingga sulit dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan hendaknya melibatkan semua element yang ada di desa, mulai dari aparat desa, ketua BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Serta menindak menyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Agar Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka Kepala Desa harus sering mengadakan pembinaan disegala bidang serta melibatkan seluruh elemen masyarakat, ini bertujuan agar pembangunan di Desa Banjar Seminai dapat berjalan dengan lancar.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR -----</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI -----</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL -----</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN -----</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah -----	1
I.2. Perumusan Masalah -----	7
I.3. Tujuan Penelitian -----	8
I.4. Manfaat Penelitian -----	8
I.5. Sistematika Penulisan -----	9
<b>BAB II    TELAAH PUSTAKA -----</b>	<b>11</b>
II.1. Teori -----	11
II. 1. Pengertian Administator Pembangunan -----	11
II. 2. Pengertian Desa -----	15
II. 3. Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan -----	18
II. 4. Definisi Konsep -----	21
II. 5. Teknik Pengukuran -----	23
II. 6. Variabel Penelitian -----	27
II.7. Hipotesa -----	27
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN-----</b>	<b>29</b>
III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian-----	29
III.2. Jenis Dan Sumber Data -----	29
III.3. Metode Pengumpulan Data-----	29
III.3. Populasi dan Sampel-----	30
III.4. Teknik Analisa Data-----	31
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN-----</b>	<b>32</b>
IV.1. Keadaan Geografis-----	32
IV.2. Keadaan Penduduk -----	35
IV.3. Mata Pencarian -----	37
IV.4. Kehidupan Sosial Keagamaan -----	38
IV.5. Pendidikan -----	38
I.V.6 Struktur Pemerintahan -----	40

<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN-----</b>	<b>47</b>
V.1.	Identitas Responden -----	47
V.I.I.	Tingkat Pendidikan -----	47
V.I.2.	Golongan Umur dan Usia-----	48
V.I.3.	Jenis Kelamin-----	49
V.2.	Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan	50
V.2.I.	Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan ----	50
V.2.2.	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	69
V.2.3.	Hambatan-hambatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	70
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN -----</b>	<b>74</b>
VI.I.	Kesimpulan -----	74
VI.I.I.	Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan ---	70
VI.I.2.	Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupten Siak -----	76
VI.2.	Saran -----	78
	Dafttr pustaka -----	
	Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I. Latar Belakang Masalah**

Prinsip Otonomi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah adapun wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ditunjukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan diorientasikan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan, terutama dalam masyarakat pedesaan. Maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh

pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan diberi peluang untuk ikut serta dalam pembangunan.

Hak dalam melaksanakan pembangunan desa juga di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut yaitu, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Agar pembangunan dipedesaan dapat terlaksana dan berjalan lancar diperlukan adanya satu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat terendah yakni Desa atau Kelurahan. Sesuai dengan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menurut Undang–Undang tersebut Pemerintah Desa merupakan pemerintah tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan. Pembangunan Desa harus dilakukan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh Desa yang

bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukung alamnya.

Sebagai kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri( otonomi desa ) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari segenap unsure kesatuan masyarakat desa. Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan administrator pembangunan desa yang dipimpinnya.

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa pada pasal 14 adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah.

Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan

Masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

Pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik

Desa, dan kerjasama antar desa.

2. Penyelenggaraan urusan pembangunan.

Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, PLTD.



### 3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Urusan kemasyarakatan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, pengerakan, bimbingan serta pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena tanpa adanya ini semua tujuan tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu pula perlu adanya seseorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut ( Kartini Kartono, 2006 : 167 )

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu desa itu bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat agar mampu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan pedesaan.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri yang didorong oleh peran aktif kepala desa sebagai Administrator Pembangunan .

Dalam melaksanakan hal tersebut tentu sangat diperlukan seorang pemimpin, yaitu Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah Desanya karena Kepala Desa itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, dengan demikian jelaslah bahwa kepemimpinan Desa merupakan Administator dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Meskipun

demikian, untuk menyelenggarakan fungsi Administator Desa secara baik dalam proses pembangunan, bukan merupakan hal yang mudah. Tidak jarang Kepala Desa di hadapkan pada kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Sebagai sampel untuk mengetahui seberapa besar fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan, penulis mengambil data pada Desa Banjar Seminai dengan alasan Desa ini dilihat dari pembangunan fisik tertinggal dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Hal ini dapat diketahui masih ada pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan realisasinya.

Dibawah ini ada beberapa progam pembangunan desa yang telah direncanakan oleh kepala desa di Desa Banjar Seminai, akan tetapi progam pembangunan tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1: Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dusun Pada Desa Banjar  
Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2010.**

Tahun	Dusun	Pelaksanaan Pembangunan	Target	Realisasi
2009-2010	Banjar Agung	Penerangan PLTD	180 KK	174 KK
2009-2010	Banjar Tengah	Pembuatan masjid	1,250 M	750 Jt
2008-2009	Banjar Agung	Pembuatan rumah diesel	50 JT	45 Jt
2009-2010	Suka Jaya	Pembuatan balai desa	105 Jt	90 Jt
2008-2009	Banjar Agung	Pembuatan gedung TK	110 Jt	90 Jt

*Sumber : Kantor Desa Banjar Seminai 2010*

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa apada tahun 2009-2010 disusunlah perencanaan yaitu pada Dusun Banjar Agung direncanakan untuk penerangan desa yang ditargetkan untuk menerangi 180 KK namun realisasinya 175 KK, pada Dusun Banjar Tengah direncanakan untuk membuat masjid mempunyai target sebesar 1,250 M, tetapi realisasinya hanya mencapai 750 Jt, kemudian pada Dusun Banjar Agung merencanakan pembuatan rumah diesel yang mempunyai target sebesar 50 Jt, namun realisasinya hanya mencapai 45 Jt. Begitu pula dengan perencanaan pembangunan yang ada di Dusun Suka Jaya telah direncanakan

membuat balai desa yang targetnya 105 Jt, namun realisasinya hanya 90 Jt. Kemudian pada Dusun Banjar Agung merencanakan untuk membuat gedung TK dengan target 110 Jt, tetapi realisasinya hanya 90 Jt. Disini masyarakat cenderung tidak mau tau atau acuh dengan program pembangunan yang dibuat oleh kepala desa, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian–uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTATOR PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK”**.

## **I. 2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan di latar belakang masalah, maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut : **“ Bagaimanakah Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan dalam Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Perekonomian, Memelihara Ketentraman, Musyawarah, dan Menyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?**  
“

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak .
- b. Untuk mengetahui hambatan–hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak .

### **I.4 . Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai informasi bagi Aparat Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Sebagai bahan dan referensi bagi peneliti yang berminat terhadap persoalan pembangunan Desa.
- c. Sebagai aplikasi dan teori perkuliahan yang berkaitan dengan masalah pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya kepemimpinan dan Kebijakan Pemerintah Desa .

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Perumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

2.1. Pengertian Administrasi Pembangunan

2.2. Pengertian Desa dan Kepala Desa

2.3. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan

2.4. Definisi Konsep

2.5. Teknik Pengukuran

2.6 . Konsep Operasional

2.7. Hipotesis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi Penelitian

3.2. Populasi dan Sampel

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.5. Teknik Analisa Data

### **BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN**

4.1. Keadan Geografis

4.2. Keadaan Penduduk

4.3. Mata Pencaharian

4.4. Kehidupan Keagamaan

4.5. Pendidikan

4.6. Stuktur Pemerintah

## **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

5.1. Identitas Responden

5.2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan.

5.3. Rekapitulasi

5.4. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran.

## **Daftar Pustaka**

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dalam penelitian ilmiah, untuk memperdalam suatu permasalahan maka sangat dibutuhkan teori-teori yang tepat, dengan demikian dalam memecahkan masalah tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri. Maka penulis akan menjelaskan beberapa teori yang tepat serta dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.

#### **II.1. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut, maka ada beberapa pengertian tentang administrasi pembangunan. Yaitu menurut Atmosudirjo ( 1999 : 59 ) Administrator merupakan pemimpin suatu Administratio atau Unit Organisasi bertanggung jawab kepada pemilik ( Megister ) yang memberikan tugas, kewajiban, dan pengarahan kepadanya.).

Menurut Sondang P. Siagian dalam kartini kartono, ( 2006 : 165 ), Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antar dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Herbert A Simon, Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerja sama untuk mencapai kegiatan sedangkan hadar nawawi administrasi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di rumuskan sebelumnya Inu Kencana Syafi'ie ( 2003 : 5 )



Sistem administrasi merupakan suatu totalitas, himpunan,, bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan sama-sama beroperasi mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan organisasi. Menurut Stephen P. Robin, administrasi adalah keseluruhan aktifitas pencapaian tujuan secara efisien melalui orang lain. Menurut beliau ada lima hal yang menjadi pengertian administrasi, diantaranya:

- 1) Adanya sekelompok orang, artinya sebuah proses administrasi akan berjalan dengan baik apabila ada orang atau sekelompok orang didalamnya.
- 2) Adanya proses kerjasama, untuk melakukan proses administrasi diperlukannya sebuah proses kerjasama yang solid dan bertanggung jawab agar tercapainya tujuan yang diinginkan.
- 3) Adanya kegiatan yang berkelanjutan, agar organisasi itu berjalan dengan baik maka sebaiknya dibuatlah kegiatan yang berkelanjutan.
- 4) Adanya tujuan, administrasi merupakan kegiatan kerjasama, oleh karena itu haruslah suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Prajudi Atmosudirjo ( 1999 : 13 ) dalam kansep, pengertian Administrator adalah setiap “ kepala organisasi” yang harus membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup, tumbuh dan serta berkembang. Administrasi merupakan suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang serta mempunyai tujuan cukup jelas yang telah disetujui dan ditetapkan sebelumnya. Baik instansi pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak swasta.

Menurut Sondang P. Siagian ( 2006: 4 ) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh setiap kelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu Inu Kencana Syafi'ie ( 2006: 4 ).

Dari beberapa pengertian Administrasi diatas maka yang dimaksudkan penulis dengan “ Administrator ” adalah seorang dengan kemampuannya atau pengetahuannya dan dengan caranya sendiri mampu menyelenggarakan pekerjaannya yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Haryono Sudiramunawar ( 2002 : 15 ), pembangunan dapat di artikan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju arah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan–masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha–usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Pengertian dari pembangunan yaitu merupakan serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa ( S.P .Siagian, 2006 : 4 ).

Dari beberapa pengertian Administrasi dan pengertian Pembangunan diatas bila digabungkan menjadi Administrasi Pembangunan dan definisi Administrasi Pembangunan itu mempunyai versi yang berbeda diantara pandangan para ahli.

Menurut S.P .Siagian ( 2006 : 5 ), Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara Bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara Bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Mustopadidjaja AR dalam skripsi Nora Padli, ( 2008: 13 ) Administrasi Pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Mencermati beberapa definisi Administrasi Pembangunan diatas dan sejalan dengan harapan penulis maka yang dimaksud dengan Administator Pembangunan dalam penelitian ini adalah seseorang, dan dalam hal ini Kepala Desa adalah sebagai “Administator Pembangunan “ di Desa harus mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan proses pembangunan, mampu menyelenggarakan berbagai pemerintahan secara efisien dan efektif.

Disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, merencanakan progam pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada

masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan pedesaan.

Pengertian Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu ( Edi Suharto, 2005: 7 )

## **II. 2. Pengertian Desa**

Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kansil ( 2001: 21 ), Desa adalah suatu wilayah yang ditempati jumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah negara kesatuan republik indonesia yang ditempati sejumlah penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan terendah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Secara faktual, pada perkembangan bentuk sebagian besar di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum

adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa.

**Kewenangan Desa menurut Undang-Undang No 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:**

- 1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal usul.**
- 2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.**
- 3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.**

**Menurut pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa, Pemerintah Desa terdiri dari :**

- 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa.**
- 2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.**
- 3. Sekretaris desa atau pegawai Negeri Sipil memenuhi persyaratan.**

**Desa dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yang dipilih oleh penduduk setempat sedangkan kelurahan dikuasai oleh seseorang lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.**

**Pada pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh**

**dan dari Penduduk Desa warga Republik Indonesia, dilantik oleh Bupati atau Wali Kota paling lambat sepuluh hari setelah pemilihan.**

**Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :**

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.**
- b. Membina kehidupan pemerintah Desa.**
- c. Perekonomian Desa.**
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Desa.**
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.**
- f. Mengajukan rancangan peraturan Desa.**
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang cukup hidup berkembang di desa yang bersangkutan.**
- h. Pelaksanaan pendapatan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada Camat.**

**Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan atau aparat pemerintah yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, disamping dituntut untuk menjalankan fungsi yang aktif dengan mengupayakan dan menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.**

**Menurut Ginanjar Kartasasmita, ( 1996 : 41 ) seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat yaitu :**

1. Ia harus memiliki idealisme, artinya kemana dan kearah mana ia membawa yang dipimpinya.
2. Ia harus memiliki pengetahuan untuk dapat secara efektif membawa desa yang dipimpinnya kearah tujuan yang di idealkan.
3. Ia haru menjadi teladan dan sumber aspirasi, artiny seorang pemimpin diharapkan menjadi sumber aspirasi dan suri tauladan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta pada bawahannya.

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemimipin itu merupakan seseorang yang dijadikan panutan untuk menjalankan segala aktivitas, serta memberikan arahan, mengontrol, mengorganisir semua kegiatan orang lain. Kepala desa harus benar-benar mengurus, mengatur, dan mengarahkan serta memimpin terhadap komitmennya sebelum dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Disini penulis berpendapat yang dimaksud pemimpin dalam hal kepala desa yang berada di desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak yang mengatur dan mengurus pembangunan didesa sendiri.

### **II. 3. Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan**

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi antara lain:

1. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.

2. **Membina Perekonomian Desa**
3. **Membina Ketentraman dan Ketertiban Desa.**
4. **Melaksanakan Musyawarah Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa.**
5. **Menyusun dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Mengenai APB Desa Untuk Dibahas Dan Ditetapkan Bersama BPD**

Sejalan dengan fungsinya diatas, sebagai administrator pembangunan fungsi kepala desa di samping selaku aparatur pemerintahan kepala desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa. Pembangunan akan berhasil apabila kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Sondang P. Siagian, ( 2005 : 159 ) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang bardaya guna, behasil guna, produktif, bersih, berwibawa, professional, dan kreatif, peka dan tanggap, aspiratof dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksanaan roda pemerintahan dan menjalankan sesuai dengan tugas dan kewengangannya.

Sebagai seorang pemimpin terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka kepala desa harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, karena Kepala Desa adalah pemimpin dari masyarakat desanya.



Menurut Kartini Kartono ( 2006: 57 ), Kepemimpinan adalah masa relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin., pemimpin tersebut muncul dan berkembang dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin.

Menurut Susilo Maryoto ( 1997:157 ), Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Berdasarkan beberapa batasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dengan kata lain kepemimpinan adalah perpaduan dari faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari perencanaan, penggerak dan motivator, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Manulang ( 2004 : 45 ) untuk membuat suatu rencana ada beberapa yang harus dilalui, yaitu: Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasikan dan menganalisis, Mengadakan kemungkinan-kemungkinan, Membuat sintesi, dan Menyusun rencana.

Menurut Sondang P. Siagian, ( 2003 : 88 ) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sesuai pendapat diatas

kepala desa harus merencanakan terlebih dahulu dan melaksanakan program pembangunan desa. Suatu perencanaan yang baik apabila kepala desa menentukan proses, program, strategi, serta tujuan yang hendak dicapai.

Untuk melaksanakan program pembangunan, kepala desa selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan. Penggerak atau motivasi adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. ( Sondang P, Siagian, 2003 : 106 ).

Dalam melaksanakan pembangunan, kepala desa harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap masalah yang dihadapi. ( S.P Siagian, 2003 : 39 ).

Agar proses pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik kepala desa harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kendala-kendala yang terjadi dilapangan bisa dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Sondang P, Siagian, ( 2003 : 112 ) berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengambilan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan adalah fungsi kepala desa sebagai perencana, penggerak pengambil keputusan, dan pengawasan uang dilakukan oleh kepala desa dalam progam pembangunan. Semakin baik kepala desa menjalankan fungsinya sebagai kepala desa, maka semakin baik hasil yang telah direncanakan. Jika fungsi kepala desa tidak bisa berjalan dengan baik, maka perencanaan pembangunan akan mengalami kegagalan.

Kepala Desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa dan menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya karena dia harus menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan. Pada dasarnya kepemimpinan kepala desa itu adalah suatu kemampuan kepala desa dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan di desa yang dipimpinnya.

#### **II.4. Definisi Konsep**

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah :

- a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang tempati oleh sejumlah atau penduduk yang mempunyai kewenangan dan tugas pembantu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten .

**b. Kepala Desa adalah kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa yang ada di Desa Banjar Seminai. Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak ,**

**c. Pembangunan Desa adalah perubahan yang dilakukan secara sadar kearah yang lebih, pembangunan di Desa Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak .**

**d. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu: Membina Masyarakat dan Perekonomian Desa, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Pelaksanaan Musyawarah Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat, dan Membuat Perencanaan Desa. Fungsi ini harus dijalankan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

**e. Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan adalah fungsi Kepala Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

- 1. Mampu Membina Kehidupan Masyarakat Desa.**
- 2. Mampu Membina Perekonomian Desa.**
- 3. Mampu Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.**
- 4. Melaksanakan Musyawarah Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa**

**5. Mampu Menyusun dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan Ditetapkan Bersama BPD.**

## **II. 5. Teknik Pengukuran.**

**Untuk memudahkan penulisan dan menganalisa permasalahan maka digunakan pengukuran fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan adalah tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayahnya, yang meliputi:**

**a. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan.**

**1). Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa. Kepala**

**Desa memiliki kemampuan dalam pembinaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat desa**

**Pengukurannya adalah:**

**Sangat Berfungsi : Apabila Kepala Desa  
seringkali memberikan pembinaan-  
pembinaan masyarakat desa serta turut  
hadir dan mengajak masyarakat agar ikut  
berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan  
yang diadakan.**

**Berfungsi : Apabila Kepala Desa  
sering memberikan  
pembinaan-pembinaan masyarakat desa, tetapi  
tidak turut hadir dalam pembinaan tersebut.**

**Cukup Berfungsi** : Apabila Kepala Desa jarang sekali memberikan pembinaan kepada masyarakat desa.

**Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam memberikan pembinaan masyarakat desa, hanya mengajak kelompok-kelompok tertentu, tanpa mengajak masyarakat yang lain.

**Sangat Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa tidak memiliki kemampuan dalam pembinaan masyarakat desa.

2). Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa. Kepala Desa memiliki kemampuan untuk membina perekonomian desa yang dipimpinnya dengan mendukung usaha yang didirikan masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat serta ikut mengawasi kegiatan simpan pinjam di Desa.

**Sangat Berfungsi** : Apabila Kepala Desa selalu mendukung dan memberikan bimbingan perekonomian serta ikut mengawasi kegiatan simpan pinjam desa.

**Berfungsi** : Apabila Kepala Desa ikut mendukung dan memberikan bimbingan perekonomian tetapi tidak ikut

mengawasi kegiatan simpan pinjam  
desa.

**Cukup Berfungsi** : Apabila Kepala Desa kurang berperan  
aktif dalam kegiatan pembinaan  
perekonomian desa.

**Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa  
hanya memberikan pembinaan  
kepada kelompok-kelompok tertentu saja.

**Sangat Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa tidak memiliki  
kemampuan dalam pembinaan perekonomian  
desa.

3). Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban  
masyarakat desa. Kepala desa memiliki kemampuan dalam memelihara  
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dengan membentuk satuan  
keamanan lingkungan dan menggerakkan masyarakat agar selalu bekerja  
sama dalam memelihara keamanan lingkungan.

**Pengukurannya adalah:**

**Sangat Berfungsi** : Apabila Kepala Desa membentuk  
satuan keamanan lingkungan dan  
menggerakkan masyarakat agar  
selalu bekerja sama dalam memelihara  
keamanan lingkungan.

**Berfungsi : Apabila Kepala Desa hanya mampu membentuk satuan keamanan dan selalu berperan aktif dalam upaya memelihara keamanan lingkungan..**

**Cukup Berfungsi : Apabila Kepala Desa hanya membentuk satuan keamanan lingkungan saja.**

**Tidak Berfungsi : Apabila Kepala Desa hanya membentuk satuan keamanan sementara masyarakat tidak dilibatkan.**

**Sangat Tidak Berfungsi : Apabila Kepala Desa tidak membentuk satuan keamanan dan tidak melibatkan masyarakat dalam memelihara ketentraman desa.**

**4). Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dengan meminta pendapat dari masyarakat dalam melaksanakan musyawarah dan mengambil kebijakan atau keputusan yang adil dengan ketelitian dan memberikan alternatif- alternatif penyelesaian mengenai perselisihan masyarakat Desa.**

**Pengukurannya adalah:**

**Sangat Berfungsi : Apabila Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah selalu**



meminta pendapat dari masyarakat dan mengambil keputusan yang adil dengan memberikan alternatif penyelesaiannya.

**Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah selalu meminta pendapat masyarakat dan mengambil keputusan yang adil tetapi kurang teliti dalam musyawarah yang diadakan.

**Cukup Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah selalu meminta pendapat dari masyarakat, tetapi tidak adil dalam pengambilan keputusan, sehingga ada pihak tertentu yang dirugikan.

**Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah tidak meminta pendapat dari masyarakat desa.

**Sangat Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan musyawarah perselihihan.

5). Kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD. Kepala Desa memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD. Kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa haruslah

mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat secara umum serta mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

**Pengukurannya adalah:**

**Sangat Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan mengacu pada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

**Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan melibatkan BPD dan meminta saran dari masyarakat.

**Cukup Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa melibatkan BPD, tetapi tidak meminta saran dari masyarakat.

**Tidak Berfungsi** : Apabila Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa melibatkan BPD, tetapi tidak meminta saran dari masyarakat.

**Sangat Tidak Berfungsi : Apabila Kepala Desa tidak bisa menyusun dan merancang peraturan desa.**

## **II . 6. Variabel Penelitian.**

**Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah variable-variabel penelitian, diantaranya adalah:**

- 1. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.**
- 2. Mampu Membina Perekonomian Desa**
- 3. Mampu Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.**
- 4. Melaksanakan Musyawarah Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa**
- 5. Mampu Menyusun dan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Mengenai APB Desa untuk dibahas dan Ditetapkan Bersama BPD**

## **II. 7. Hipotesa**

**Pembangunan sebuah Desa akan berhasil apabila Kepala Desa mampu menjalankan fungsinya sebagai Administator Pembangunan yaitu sebagai perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan, mengkoordinasi dan fungsi pengawas pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan pedesaan tentulah timbul hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah : Kurangnya data**

mengenai potensi desa, Kurangnya motivasi, kurangnya koordinir, kurangnya pengawasan dan ketidak tegasan kepala desa dalam mengambil keputusan. Sedangkan masyarakat desa, mereka kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam musyawarah desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang terjadi dilapangan terhadap desa sampel dapat diketahui bahwa “ Diduga Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar Seminai belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2007”’.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **III. I Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dengan waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan. Dengan pertimbangan dan alasan bahwa Desa Banjar Seminai relative tertinggal dari segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa lainnya.

#### **III. 2. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah, Data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui penelitian lapangan yaitu berupa informasi dan dari wawancara.
2. Data sekunder adalah, Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti mengenai Demografi Pemerintah Desa Banjar Seminai.

#### **III. 3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara atau metode, yaitu:

1. Wawancara ( Interview ), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Angket ( Quesioner ), yaitu kegiatan penyebaran angket yang berupa daftar tertulis kepada responden, yang disesuaikan dengan alternative jawaban yang telah di sediakan.
3. Observasi, yaitu pantauan yang dilaksanakan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

### **III. 4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian jumlah dari karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono ( 2005:90 )

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Masyarakat di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang berjumlah 2793 jiwa ( data tahun 2010 ) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena populasi besar maka penulis hanya mengambil 10% dari populasi yang berjumlah 2793 jiwa. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan n = Jumlah sampel

N = Besar Populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, dimana tingkat kesalahan yang ingin diambil 10% dengan jumlah masyarakat sebesar 2793 jiwa.

$$n = \frac{2793}{1 + 2793(10\%)^2}$$

$$n = \frac{2793}{1 + 2793(0.01)}$$

$$n = \frac{2793}{1 + 27,93}$$

$$n = \frac{2793}{28,93}$$

$$n = 96,55$$

Jadi sampel yang akan diambil sebanyak 96 jiwa dari 2793 populasi.

**Tabel III.I. Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Banjar Seminai.**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekdes	1	1	100%
3	Ketua BPD	1	1	100%
4	Masyarakat	2793	96	10%
Jumlah		2796	99	

*Sumber Data: Data Olahan Tahun 2010*

### III. 5. Teknik Analisa Data

Setelah data dan semua bahan-bahan yang mendukung yang diperoleh dan terkumpul melalui penelitian lapangan, penulis mengelompokkan dan

memisahkan data tersebut menurut jenisnya dan dijelaskan dalam bentuk tabel frekuensi ssdan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, kemudian diambil suatu kesimpulan.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **IV. 1. Keadaan Geografis**

Desa Banjar Seminai merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi batas-batas di Desa Banjar Seminai adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Suka Jaya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Banjar Tengah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Inti 11.

Desa Banjar Seminai mempunyai dusun sebanyak 3 dan satu kelurahan dengan luas 1077500 m<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 2793 jiwa. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografis yang merupakan daerah dataran tinggi, yaitu pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan raya. Keadaan iklim di Desa Banjar Seminai adalah beriklim sub-tropis, dimana terdapat dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 30°C - 34 °C

Adapun keadaan desa sample yaitu Desa Banjar Seminai di sebelah selatan yang berbatasan dengan Dusun Banjar Tengah dengan jarak 1 km dari Desa Banjar Seminai. Dari sini dapat diketahui Desa yang dijadikan sample adalah desa Desa Banjar Seminai itu sendiri yang berada diujung Desa dan berbatasan langsung dengan desa tetangga.

Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.I : Luas Wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

No	Dusun	Luas wilayah Ha ( m <sup>2</sup> )
1	Dusun Banjar Agung	450000 m <sup>2</sup>
2	Dusun Banjar Tengah	375000 m <sup>2</sup>
3	Dusun Suka Jaya	127500 m <sup>2</sup>
4	Dusun Inti II	125000 m <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>1077500 m<sup>2</sup></b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010*

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas Desa Banjar Seminai adalah 1077500 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 dusun dan 1 kelurahan. Keadaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah karena terdapat perkebunan kelapa sawit dengan kondisi tanah ( fisiografi ) pada lapisan atas berwarna hitam dan lapisan bawah berwarna kuning.

#### **IV.2. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk dari Desa Sampel yaitu Desa Banjar Seminai adalah 2793 jiwa. Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak daerah yang penduduk relative padat dengan luas 1077500 m<sup>2</sup>. Sebagai penduduk terpadat nomor 2 di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

beberapa desa yang ada Kecamatan Dayun. Kemudian sebagian besar penduduk tinggal di perumahan perkebunan kelapa sawit. Untuk mengetahui jumlah penduduk dusun di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah ( Jiwa )</b>
1	Dusun Banjar Agung	1132
2	Dusun Banjar Tengah	991
3	Dusun Suka Jaya	237
4	Dusun Inti II	433
<b>Jumlah</b>		<b>2793</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Desa Banjar Seminai adalah 2793 jiwa. Dimana antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relative seimbang. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1432 dan jumlah penduduk perempuan adalah 1361 jiwa. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk di Rinci Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

No	Dusun	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun Banjar Agung	572	560
2	Dusun Banjar Tengah	510	481
3	Dusun Suka Jaya	124	113
4	Dusun Inti II	226	207
<b>Jumlah</b>		<b>1432</b>	<b>1361</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010*

#### **IV.3. Mata Pencarian**

Mata pencarian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencarian penduduk Desa Banjar Seminai beraneka ragam, dan sebagian besar penduduk desa ini hidup bertani dan berkebun. Selain itu ada juga Berdagang, Buruh, Guru, PNS, Berternak dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu masyarakat juga bekerja sebagai petani sawit dari kebun mereka sendiri, namun sebagian kecil masyarakat desa banjar seminai dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih ada yang mengandalkan menjadi buruh petani sawit, dan buruh bangunan.

#### IV. 4. Kehidupan Sosial Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar dari setiap individu. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Banjar Seminai adalah beragama islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen ini adalah pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.4. Jumlah Penduduk di Desa Banjar Seminai Menurut Jenis Agama Yang di Anut.**

No	Agama	Jumlah	persentase
1	Islam	2730	97,74
2	Kristen	63	2,26
<b>Jumlah</b>		<b>2793</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.*

Untuk menunjang rutinitas peribadatan di Desa Banjar Seminai perlu kiranya dibangun tempat beribadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Banjar Seminai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.5. Jumlah Tempat Ibadah di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

<b>N0</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Masjid	4	25
2	Mushala/ Surau	10	62,5
3	Gereja	2	12,5
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat Masjid, Mushala atau surau. Sedangkan tempat ibadah untuk agama Kristen, budha dan hindu yaitu seperti gereja, wiara, klenteng tidak ada. Hal ini dapat di maklumi karena jumlah pemeluknya sangat sedikit.

#### **IV. 5. Pendidikan**

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di Desa Banjar Seminai. Karena pendidikan merupakan bagian terpenting bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan SDM. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada diwilayah Desa Banjar Seminai mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA telah ada. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan yang ada di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 6. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	PAUD	3	–	3
2	TK	3	–	3
3	SD	2	–	2
4	SLTP	2	–	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	–	<b>10</b>

*Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.*

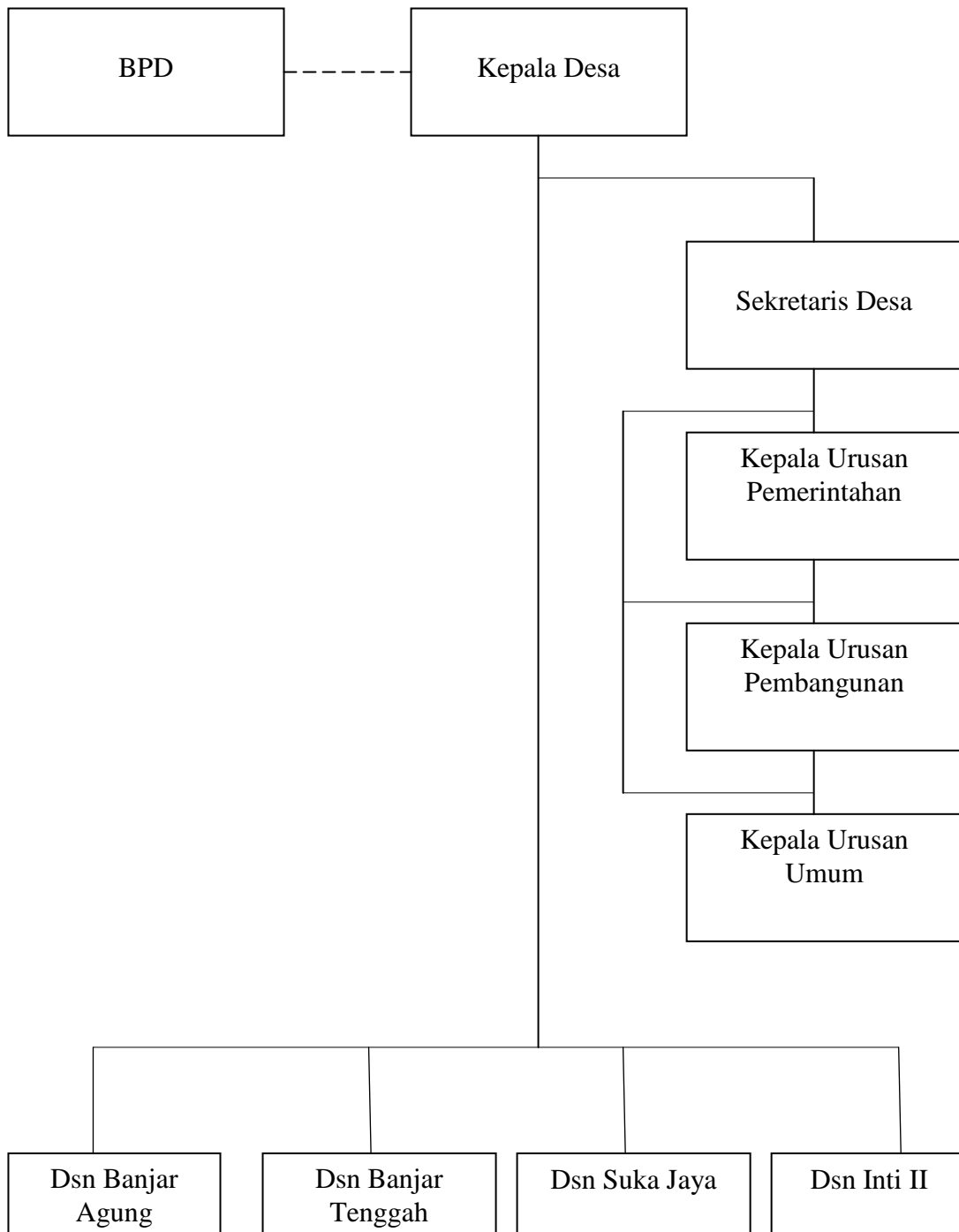
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan pendidikan yang paling banyak adalah gedung sekolah dasar ( SD ). Berikut adalah prasarana gedung Sekolah Lanjut Pertama ( SLTP ), gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan gedung sekolah Taman Kanak-Kanak ( TK ).

#### **IV. 6. Struktur Pemerintahan**

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lain sebagainya.

Menurut Sondang P. Siagian, suatu organisasi yang bagus adalah menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Untuk mengetahui suatu struktur organisasi pemerintah di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat dari gambar berikut ini :

**Gambar I : Struktur Organisasi Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun  
Kabupaten Siak.**



*Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Banjar Seminai 2010*



Berdasarkan gambar I diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

I. Kepala Desa.

- a. Kedudukan : Sebagai pelaksanaan penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Tugas : Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi : Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, membina perekonomian desa, koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris Desa.

- a. Kedudukan : Sebagai unsur staf membantu bidang Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- b. Tugas : Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketata usahaan desa.
- c. Fungsi : Melaksanakan tata kearsipan, urusan surat menyurat, melaksanakan keuangan dan melaksanakan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam segala hal bila Kepala Desa berhalangan.

3. Kepala Urusan.

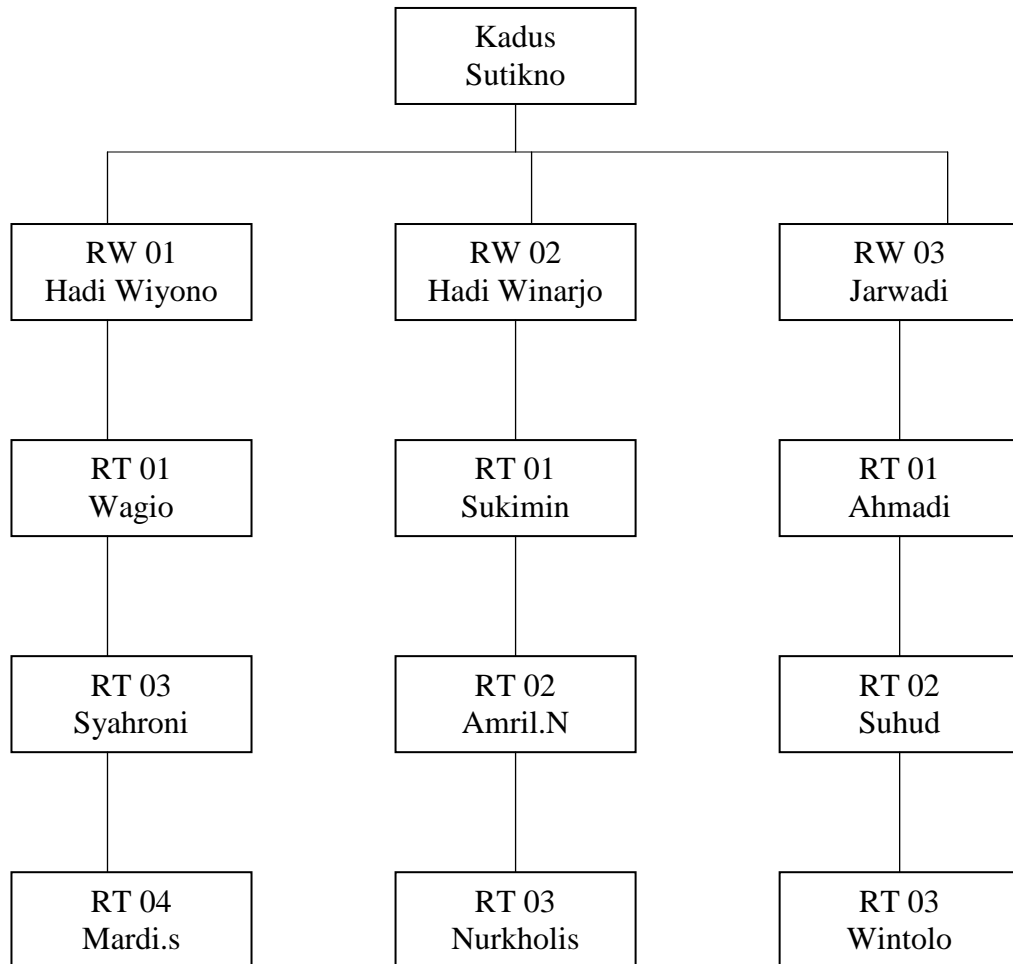
- a. Kedudukan : Sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.
- b. Tugas : Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Fungsi : Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang penyusunan tugasnya masing-masing.

4. Kepala Dusun.

- a. Kedudukan : Sebagai Pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Tugas : Menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa, melaksanakan pemerintah desa dibawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.
- c. Fungsi : Melaksanakan kegiatan pemerintah, dan pembangunan kemasyarakatan diwilayah kerjanya. ( Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.14 Tahun 2007 : Pasal 4 Sampai Pasal 13 )

**Gambar 2 : Srtuktur Organisasi Dusun Banjar Agung Desa Banjar Seminai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

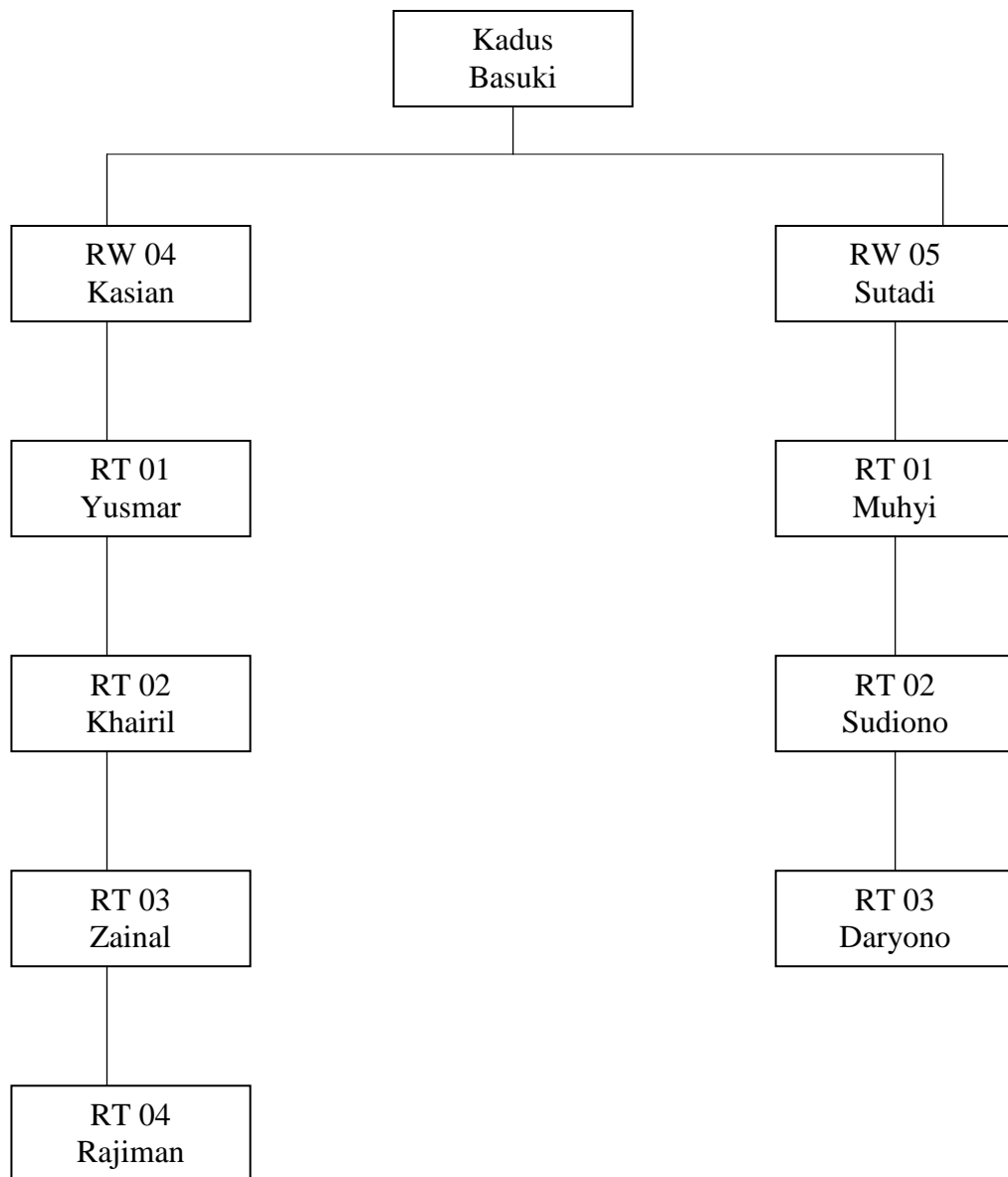
Dusun Banjar agung



*Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Banjar Seminai 2010*

**Gambar 3 : Srtuktur Organisasi Dusun Banjar Tengah Desa Banjar Seminai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

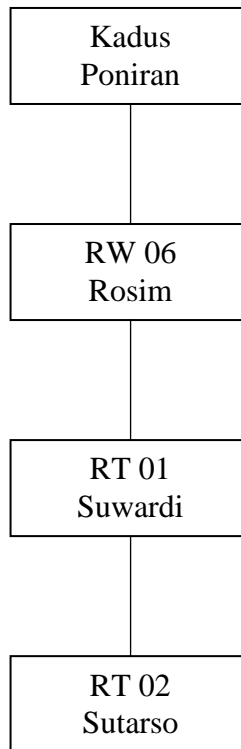
Dusun Banjar Tengah



*Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Banjar Seminai 2010*

**Gambar 4 : Srtuktur Organisasi Dusun Suka Jaya Desa Banjar Seminai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

Dusun Suka Jaya



*Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Banjar Seminai 2010*

## BAB V

### ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### V. I. Identitas Responden

Identitas responden sangat bermanfaat dalam suatu penelitian, guna mengetahui latar belakang responden antara lain : mengetahui tingkat pendidikan, golongan umur atau usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengemukakan identitas responden dilihat dari:

##### V.1.1. Tingkat Pendidikan.

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat di ketahui pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.I : Tingkat Pendidikan desa sampel di Desa Banjar Seminai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	15	25.86%
2	SMP	21	36.21
3	SMA	14	24.14
4	Diploma	5	8.62
5	SI ( Sarjana )	3	5.17
Jumlah		58	100%

*Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dimana responden paling banyak adalah responden yang tingkat pendidikan SMP yakni sebanyak 21 orang atau 36,21%, selanjutnya tamat SD sebanyak 15 orang atau 25,86%, tamat SMA sebanyak 14 orang atau 24,14%, tamatan diploma 5 orang atau 8,62%, dan tamatan Sarjana 3 orang atau 5,17%. Keadaan ini sesuai dengan kenyataan masyarakat di desa sampel dimana sebagian besar masyarakatnya hanya sampai tamatan SMP.

#### **V.1.2. Golongan Umur dan Usia**

Adapun golongan umur atau usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.2 : Golongan Umur Atau Usia Responden Didesa Sampel Desa**

#### **Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak**

<b>No</b>	<b>Golongan Umur/Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	15-25 Tahun	8	13.8
2	25-30 Tahun	20	34,48
3	31-40 Tahun	20	34.48
4	40-50 Tahun	6	10.34
5	>55 Tahun	4	6.9
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui golongan umur atau usia dari 58 responden pada penelitian ini yang lebih banyak adalah responden yang memiliki golongan umur atau usia 25-30 Tahun yaitu sebanyak 20 orang atau 34.48%

karena menurut penulis pada usia ini seseorang bisa memberikan saran atau ide-ide yang lebih segar atau lebih bijaksana, selebihnya responden yang memiliki golongan umur atau usia 15-20 tahun sebanyak 8 orang atau 13.8%,selanjutnya golongan umur atau usia 31-40 tahun sebanyak 20 orang atau 34.48%, selanjutnya golongan umur atau usia 40-50 tahun sebanyak 6 orang atau 10.34%, dan golongan umur atau usia > 55 tahun sebanyak 3 orang atau 6.9%.

Golongan umur atau usia > 55 tahun sangat sedikit karena menurut penulis pada golongan usia ini banyak tidak aktif lagi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa.

### **V.I.3. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden Masyarakat Desa Di Desa Sampel Di  
Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	24	41,38
2	Perempuan	34	58,62
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden di desa sampel pada Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang atau 58,62% dan selebinya dengan responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 24



orang atau 41,38%. Alasan penulis mengambil sampel jenis kelamin perempuan adalah perempuan lebih mudah dijumpai, sedangkan kaum laki-laki sulit dimintai keterangan dan sibuk dengan kegiatannya.

## **V. 2. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan.**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada desa sampel di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada di wilayahnya dilihat dari kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Administrator Pembangunan di desa yang dipimpinnya, yaitu sebagai berikut:

### **V.2.1. Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan**

#### **1) Kemampuan Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa.**

Kemampuan kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Banjar Seminai. Pembinaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa selalu mengadakan acara-acara keagamaan, menggalangkan program PKK, Gotong royong, kebersihan lingkungan, dan melestarikan adat istiadat.

Dari wawancara pada tanggal 26 April 2010 dengan Kepala Desa Banjar Seminai beliau mengatakan :

“Setiap kegiatan pembinaan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka membina masyarakat kearah perubahan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum pembinaan dilaksanakan, terlebih dahulu saya memberikan penjelasan setiap kegiatan pembinaan”.

Pembinaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab kepala desa yang bekerja sama dengan masyarakatnya. Pembinaan yang baik adalah apabila Kepala Desa ikut hadir dalam acara-acara yang diadakan, kemudian haruslah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Sedangkan kesimpulan dari wawancara dengan ketua BPD di Desa Banjar Seminai ( tanggal 27 April 2010 ) beliau mengatakan:

“Kepala Desa memang melaksanakan pembinaan, tetapi kepala desa tidak ikut melakukan pemantau menyeluruh terhadap kegiatan yang diadakan. Seharusnya kepala desa ikut memantau terlebih dahulu kegiatan yang cocok dan sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat akan lebih banyak menghadiri kegiatan tersebut dan pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan”

Kegiatan pembinaan masyarakat desa haruslah berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa, sehingga masyarakat yang diajak dalam pembinaan tersebut mau ikut berpartisipasi kemudian Kepala Desa akan mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembinaan tersebut sehingga nantinya dapat dijadikan tolak ukur terhadap pembangunan pedesaan.

Dari hasil tanggapan responden di Desa Banjar Seminai mengenai kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Tabel V.4: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Kepala Desa hadir dalam acara keagamaan	48	32	9	7	-	96
		50 %	33,33%	9,37%	7,30%	-	100%
2	Kepala Desa ikut menggalan gkan program PKK	34	46	16	-	-	96
		35,42%	47,92%	16,66%	-	-	100%
3	Kepala Desa ikut gotong royong	25	63	8	-	-	96
		26,04%	65,63%	8,33%	-	-	100%
4	Kepala Desa bersedia ikut melakukan kebersihan desa	29	39	11	17	-	96
		30,21%	40,62%	11,46%	17,71%	-	100%
5	Kepala Desa ikut melestarikan adat budaya	16	48	32	-	-	96
		16,67%	50%	33,33%	-	-	100%
6	Total	152	228	76	24	-	480
		31,67%	47,5%	15,83%	5%	-	100%
7	Rata-Rata	30,4	45,6	15,2	4,8	-	96
		31,67%	47,5%	15,83%	5%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2010.

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 47,5% menilai fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa pada kategori ‘‘setuju’’, namun masih ada responden yang ‘‘tidak setuju’’ yaitu 5%.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.4 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 47,5% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam membina masyarakat desa di Desa Banjar Seminai.

Tanggapan responden pada kategori ‘‘setuju’’ lebih banyak dikarenakan kepala desa menjelaskan terlebih dahulu tujuan diadakannya pembinaan tersebut dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun data sekunder yang diperoleh penulis dari kantor Kelurahan mengenai keikutsertaan Kepala Desa dalam menggalangkan progam PKK adalah dalam progam ini Kepala Desa kurang berperan aktif, karena beliau hanya memberikan pembinaan tetapi pelaksanaannya kurang berjalan baik. Sehingga penulis cukup sulit untuk mendapatkan data sekunder ini, dikarenakan tidak ada data yang cukup mendukung kecuali melihat fakta dilapangan.

Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sekali dalam seminggu, dengan mengikut sertakan masyarakat yang ada di setiap dusun di desa banjar seminai.

Hari yang dijadikan untuk gotong royong ini tidak bersamaan. Melainkan setiap hari senin dilakukan gotong royong di dusun banjar agung, kemudian hari rabu diadakan gotong royong di dusun banjar tengah, selanjutnya hari jum'at di dusun suka jaya dan hari minggu di dusun inti II. Sedangkan Kepala Desa sendiri tidak bisa selalu hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut, ini mengakibatkan partisipasi masyarakat berkurang, karena tidak ada yang memimpin.

## 2). Kemampuan Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian Desa

Bidang ekonomi merupakan sektor yang paling penting dalam setiap kehidupan masyarakat desa. Kepala Desa diharapkan mampu melaksanakan pembinaan perekonomian desa yang dipimpinnya karena ialah motor penggerak perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pembinaan perekonomian yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sekretaris desa di desa sampel ( tanggal 27 Apri 2010 ). Mereka mengatakan:

“ Kepala Desa sebelum melaksanakan pembinaan perekonomian desa selalu meminta pendapat, dan saran dari aparat desa dan tokoh masyarakat barulah kemudian aparat desa ditugaskan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap penyuluhan dan bimbingan masyarakat desa disemua bidang yang bersifat membangun”

Pembinaan perekonomian masyarakat desa merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Pembinaan perekonomian yang dilakukan oleh Kepala Desa haruslah kegiatan yang menyentuh dengan apa yang dibutuhkan

oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan.

Adapun tanggapan responden pada desa sampel mengenai kemampuan Kepala Desa dalam membina perekonomian desa dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel V.5: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Kepala Desa ikut mengembankan desa	26	37	24	9	-	96
		27,08%	38,55%	25%	9,37%	-	100%
2	Kepala Desa berperan aktif dalam pembinaan perekonomian	18	58	20	-	-	96
		18,75%	60,42%	20,83%	-	-	100%
3	Kepala Desa mengetahui pembukuan desa	29	55	12	-	-	96
		30,22%	57,3%	12,5%	-	-	100%
4	Kepala Desa selalu mendukung usaha	30	51	11	4	-	96
		31,25%	53,12%	11,46%	4,17%	-	100%
5	Kepala Desa ikut mengawasi simpan pinjam	22	33	33	8	-	96
		22,92%	34,37%	34,37%	8,34	-	100%
6	Total	125	234	100	21	-	480
		26,04%	48,75%	20,84%	4,37%	-	100%
7	Rata-Rata	25	46,8	20	4,2	-	96
		26,04%	48,75%	20,84%	4,37%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2010.

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 48,75 % menilai fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa pada kategori “setuju”, namun masih ada responden yang “tidak setuju” yaitu sebanyak 4,37 %.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.5 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 48,75% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan perekonomian desa di Desa Banjar Seminai.

Tanggapan responden pada kategori “setuju” lebih banyak dikarenakan kepala desa memiliki kemampuan dalam membina perekonomian desa dengan baik.

Adapun data sekunder yang diperoleh penulis dari lapangan adalah mengenai kemampuan Kepala Desa dalam mengawasi kegiatan simpan pinjam, dalam hal ini adalah Pelaksanaan Progam Pemberdayaan Desa ( PPD ), rapat ini diadakan pada tanggal 01 Januari 2010 bertempat di Balai Desa Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Topik pembahasannya adalah Laporan Pengelola UED SP ( Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ), Laporan SP ( Simpan Pinjam ), Denda Keterlambatan UED SP, Simpana Suka Rela.

Dalam upaya mendukung usaha yang didirikan oleh masyarakat, Kepala Desa hanya memberikan tanda tangan persetujuan mengenai surat izin usaha yang dibuat di kantor desa.



### 3).Kemampuan Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Kepala Desa dan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dengan membentuk satuan keamanan lingkungan dan mengikut sertakan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan sekretaris desa sampel ( tanggal 28 april 2010 ) mereka mengatakan:

“Kepala Desa sebenarnya telah telah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dengan baik yaitu dengan cara membentuk suatu kesatuan keamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat desa. Dalam musyawarah Kepala Desa selalu mengajak masyarakat dan setiap tindakannya selalu melibatkan masyarakat desa”.

Ketentraman dan ketertiban merupakan keinginan bersama masyarakat desa, hal ini haruskah menjadi perhatian serius oleh Kepala Desa. Ketentraman dan ketertiban akan menciptakan keamanan lingkungan masyarakat desa dan nantinya akan mempercepat proses pembangunan desa.

Adapun tanggapan responden di desa sampel mengenai kemampuan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini

Tabel V.6: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Memelihara dan Ketertiban Masyarakat Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Kepala Desa membentuk siskamling	28	48	6	14	-	96
		29,16%	50%	6,26%	14,58%	-	100%
2	Kepala Desa berperan memelihara ketentraman	24	50	6	16	-	96
		25%	52,08%	6,26%	16,66%	-	100%
3	Kepala Desa membuat peraturan desa	21	54	8	13	-	96
		21,87%	56,25%	8,33%	13,55%	-	100%
4	Kepala Desa menjaga keamanan desa	33	39	15	4	5	96
		34,38%	40,63%	15,62%	4,16%	5,21%	100%
5	Kepala Desa berupaya memelihara ketentraman dan ketertiban desa	21	30	8	37	-	96
		21,88%	31,25%	8,33%	38,54%	-	100%
6	Total	127	221	43	84	5	480
		26,46%	46,04%	8,96%	17,5%	1,04%	100%
7	Rata-Rata	25,4	44,2	8,6	16,8	1	96
		26,46%	46,04%	8,96%	17,5%	1,04	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju  
STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 46,04% menilai fungsi kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban desa pada kategori ‘‘setuju’’, namun masih ada responden yang ‘‘sangat tidak setuju’’ yaitu 1,04%.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban desa di Desa Banjar Semina berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.6 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 46,04% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban desa di Desa Banjar Semina.

Tanggapan responden pada kategori ‘‘setuju’’ lebih banyak dikarenakan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan membentuk satuan keamanan lingkungan dan selalu bekerjasama dengan masyarakat desa.

#### 4) Kemampuan Dalam Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa.

Musyawarah merupakan suatu jalan yang harus ditempuh oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa yang dipimpinnya. Kepala Desa dituntut harus teliti dalam setiap mengambil kebijakan ataupun keputusan penyelesaiannya tersebut, jangan sampai dari kedua belah pihak ada yang dikorbankan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa pada desa sampel ( tanggal 29 April 2010 ) beliau mengatakan:

“Perselisihan masyarakat desa merupakan hal yang paling banyak dijumpai pada masyarakat, dan perlu dilaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya telah melakukan musyawarah untuk mufakat kemudian saya juga memberikan solusi atau jalan keluar penyelesaiannya, serta saya mengambil keputusan yang seadil-adilnya agar tidak merugikan kedua belah pihak”.

Sedangkan menurut pandangan ketua BPD pada desa sampel ( tanggal 29 April 2010 ) beliau mengatakan:

“Kepala desa memang melaksanakan musyawarah mengenai perselisihan masyarakat desa dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya, akan tetapi ada pihak-pihak yang terkait tidak merasa puas dengan keputusan yang diambil, hal ini dikarenakan Kepala Desa lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.

Dari hasil tanggapan responden di Desa sampel mengenai kemampuan kepala desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7: Rekapitulasi Tangapan Responden Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Kepala Desa mempunyai peraturan	19	45	6	21	5	96
		19,79%	46,88%	6,25%	21,88%	5,20%	100%
2	Kepala Desa meminta pendapat dari masyarakat	34	47	6	9	-	96
		35,41%	48,96%	6,25%	9,38%	-	100%
3	Kepala Desa membuat peraturan-peraturan desa	44	33	11	8	-	96
		45,83%	34,38%	11,46%	8,33%	-	100%
4	Ketelitian dalam menyelesaikan perselisihan	23	53	7	13		96
		23,96%	55,20%	7,3%	13,54%	-	100%
5	Kepala Desa memberikan alternative	22	55	8	11	-	96
		22,92%	57,29%	8,33%	11,46%	-	100%
6	Total	142	233	38	62	5	480
		29,6%	48,54%	7,91%	12,91%	1,04	100%
7	Rata-Rata	28,4	46,6	7,6	12,4	1	96
		29,6%	48,54%	7,91%	12,91%	1,04%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2010.

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 48,54% menilai fungsi kepala desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa pada kategori “setuju”, namun masih ada responden yang menjawab “sangat tidak setuju” yaitu 1,04%.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.7 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 48,54% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa di Desa Banjar Seminai.

Tanggapan responden pada kategori “setuju” lebih banyak dikarenakan Kepala Desa memiliki kemampuan dalam melaksanakan musyawarah untuk mufakat, mereka juga mengambil kebijakan dan keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

#### 5) Kemampuan Dalam Menyusun Dan Merancang Peraturan Desa Dengan Persetujuan BPD

Dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD, Kepala Desa dituntut mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD kemudian barulah peraturan tersebut ditanda tanggani oleh Bupati selaku Kepala Daerah asalkan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat desa

dan pada kesejahteraan masyarakat secara umum serta mengikat pada keseluruhan desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan.

Menurut wawancara penulis dengan Kepala Desa di desa sampel ( tanggal 30 April 2010 ) beliau mengatakan:

“Dalam menyusun dan merancang peraturan desa saya menyusun peraturan tersebut dan mengajukan kepada anggota BPD. Peraturan tersebut mengacu pada kepentingan masyarakat desa serta pada kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengikat pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan.

Peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan kepentingan dan kebutuhan desa. Dalam menyusun peraturan desa sebaiknya peraturan tersebut disusun dan dirancang oleh kepala desa bersama ketua BPD. Peraturan Desa yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Sedangkan menurut ketua BPD desa sampel ( tanggal 30 April 2010 ) beliau mengatakan:

“Kepala desa memang menyusun dan merancang peraturan desa serta meminta persetujuan dengan kami para anggota BPD, akan tetapi peraturan desa yang dibuat kadangkadang kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil menengah kebawah”.

Kepentingan masyarakat desa lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam musyawarah yang dilaksanakan nantinya akan diketahui saran-saran dan kebutuhan yang dirasakan penting. Barulah peraturan disusun.

Tanggapan responden di Desa Sampel, mengenai kemampuan kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan meminta persetujuan kepada BPD dapat diketahui pada tabel dibawah ini:



Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menyusun dan Merancang Peraturan bersama BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Kepala Desa ikut merumuskan peraturan desa	30	48	7	11	-	96
		31,25%	50%	7,3%	11,45%	-	100%
2	Kepala Desa sering melakukan musyawarah	36	40	-	20	-	96
		37,5%	41,67%	-	20,83%	-	100%
3	Kepala Desa bekerjasama dengan BPD	33	51	-	12	-	96
		34,37%	53,13%	-	12,5%	-	100%
4	Kepala Desa sering meminta saran	47	33	5	11	-	96
		48,96%	34,37%	5,21%	11,46%	-	100%
5	Kepala Desa dan BPD menampung aspirasi masyarakat	36	36	5	19	-	96
		37,5%	37,5%	5,21%	19,79%	-	100%
3	Total	182	208	17	73	-	480
		37,92%	43,33%	3,54%	15,21%	-	100%
4	Rata-Rata	36,4	41,6	3,4	14,6	-	96
		37,92%	43,33%	3,54%	15,21%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2010.

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 43,33% menilai fungsi kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan bersama BPD pada kategori “setuju”, namun masih ada responden yang menjawab “ragu-ragu yaitu 3,54 %.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan bersama BPD di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.8 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 43,33% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan bersama BPD desa di Desa Banjar Seminai.

Tanggapan responden pada kategori “setuju” lebih banyak dikarenakan kepala desa mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD dan melibatkan lembaga kemasyarakatan lainnya yang mengurus mengenai pembangunan serta mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat.

. Berikut ini ada rapat yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDes tahun anggaran 2010 yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2010. Yang berisi: “Pada hari ini, senin tanggal dua puluh dua bulan dua tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor BPD Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak telah diadakan

rapat BPD Banjar Seminai, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota BPD. Serta Kepala Desa dan perangkat desa dan undangan lainnya dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPBDes) Desa Banjar Seminai Tahun 2010.

Dapat rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPBDes Desa Banjar Seminai Tahun 2010 dengan rincian:

a. Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 356.947.282,-
-----------------------------	-------------------

b. Anggaran Belanja Desa	
--------------------------	--

- Anggaran Belanja tidak Langsung	Rp. 299.360.000,-
-----------------------------------	-------------------

- Anggaran Belanja Langsung	Rp. 71.977.282,- +
-----------------------------	--------------------

	<u>Rp. 371.337.282,-</u>
--	--------------------------

Surplus/Defisit	<u>Rp. ( 14.390.000 )</u>
-----------------	---------------------------

c. Anggaran Pembiayaan Desa	
-----------------------------	--

- Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.390.000,-
----------------------------------	------------------

- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.14.390.000,-+</u>
-----------------------------------	-------------------------

Selisih Pembiayaan ( a-b )	<u>Rp. 0</u>
----------------------------	--------------

2. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPBDes ) Desa Banjar Seminai Tahun 2010 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran

Pendapatan dan Belanja ( APBDes ) dengan Peraturan Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai seluruh tanggapan responden berikut disusunlah rekapitulasi dan tanggapan responden di desa sampel mengenai variabel penelitian tentang “ Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan ” di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, adalah sebagai berikut:

#### **V.2.2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Kepala Desa**

##### **Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

Hasil Rekapitulasi Hasil angket tentang Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

**Tabel V.9: Rekapitulasi Hasil Angket tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala  
Desa Sebagai Administator Pembangunan di Desa Banjar  
Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Pembinaan Masyarakat	152	228	76	24	-	480
		31,67%	47,5%	15,83%	5%	-	100%
2	Pembinaan Perekonomian	125	234	100	21	-	480
		26,04%	48,75%	20,84%	4,37%	-	100%
3	Memelihara Ketentraman	127	221	43	84	5	480
		26,46%	46,04%	8,96%	17,5%	1,04%	100%
4	Musyawarah Perselisihan	142	233	38	62	5	480
		29,6%	48,54%	7,91%	12,91%	1,04%	100%
5	Merancang Peraturan	182	208	17	73		480
		37,92%	43,33%	3,54%	15,21%		100%
5	Total	728	1124	274	264	10	2400
		30,33%	46,84%	11,41 %	11%	0,42%	100%
6	Rata-Rata	145,6	224,8	54,8	52,8	2	480
		30,33%	46,84%	11,41%	11%	0,42%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dari tabel V.9 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, ternyata kebanyakan responden yaitu 46,84% menilai sudah setuju, namun masih ada responden yang menilai sangat tidak setuju yaitu 0,42%.

Dari rekapitulasi jumlah angket Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat bahwa:

1. Fungsi Pembinaan Masyarakat.

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa telah berfungsi dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 228 dari 480.

2. Fungsi Pembinaan Perekonomian Desa.

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam pembinaan perekonomian desa telah berfungsi dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 234 dari 480.

3. Fungsi Memelihara Ketentraman Desa.

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam memelihara ketentraman desa telah berfungsi dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 221 dari 480.

4. Fungsi Musyawarah Penyelesaian Perselisihan

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam Musyawarah Penyelesaian Perselisihan telah berfungsi dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 233 dari 480.

5. Fungsi Dalam Menyusun dan Merancang Peraturan Desa.

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi kepala desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa telah berfungsi dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 208 dari 480.

**V.2.3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:**

1. Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa adalah:
  - a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan yang dilaksanakan.
  - b. Tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa dan kemauan masyarakat karna mereka sulit untuk dikumpulkan dalam pelatihan.
  - c. Terlalu banyaknya suara masyarakat sehingga sulit untuk disatukan.
2. Kemampuan Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian desa adalah:
  - a. Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  - b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengarahan yang disampaikan Kepala Desa dalam pembinaan tersebut.
  - c. Kurangnya data yang akurat mengenai perekonomian masyarakat desa sehingga Kepala Desa kesulitan dalam membina perekonomian tersebut.
3. Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah:
  - a. Masyarakat hanya mau ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban apabila hanya diberi gaji.
  - b. Masyarakat susah untuk dikumpulkan musyawarah mengenai ketentraman dan ketertiban desa.

- c. Keluhan-keluhan masyarakat kurang ditanggapi dalam hal keamanan lingkungan.
4. Kemampuan Dalam Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa adalah:
- a. Solusi-solusi yang diberikan kurang diterima oleh pihak yang berselisih.
  - b. Keputusan yang diambil cenderung dipaksakan karena masyarakat yang terlibat perselisihan tidak mau mengalah satu sama lain.
  - c. Sulitnya mengumpulkan masyarakat yang terlibat perselisihan dalam musyawarah untuk menyelesaikannya
5. Kemampuan Dalam Menyusun dan Merancang Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD adalah:
- a. Rendahnya pemahaman Kepala Desa dan anggota BPD dalam menyusun peraturan desa.
  - b. Peraturan desa yang dihasilkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil ke bawah.
  - c. Peraturan desa kurang disosialisasikan kepada masyarakat.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan Dengan Mengambil Sample Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak” maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **V.I.. Kesimpulan**

##### **VI.1.I. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan.**

- a). Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa adalah:

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa ternyata sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban 45 responden atau (47,5%). Dengan alasan bahwa kepala desa menjelaskan terlebih dahulu tujuan diadakannya pembinaan tersebut dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

- b). Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa adalah:

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa ternyata sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban 46 responden atau (48,75%), karena kepala desa selalu mendukung usaha yang didirikan oleh masyarakat dan memberikan pembinaan demi kesejahteraan masyarakat.

- c). Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah:

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ternyata sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban 44 responden atau (46,04%). Dengan alasan bahwa Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat membentuk satuan keamanan lingkungan serta pos ronda dan selalu bekerjasama dengan masyarakat desa.

- d). Kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa adalah:

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa ternyata sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban 46 responden atau (48,54%). Dengan alasan bahwa Kepala Desa memiliki kemampuan dalam melaksanakan musyawarah untuk mufakat, mereka juga mengambil kebijakan dan keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak

- e). Kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD adalah:

Pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD ternyata sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat

dari jumlah jawaban 42 responden atau (43,33%). Dengan alasan bahwa kepala desa mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD dan melibatkan lembaga kemasyarakatan lainnya yang mengurus mengenai pembangunan serta mengacu pada kepentingan masyarakat desa dan pada kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas secara keseluruhan bahwa pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa anjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik.

#### **VI.I.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa**

##### **Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Banjar Seminai**

##### **Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:**

1. Kemampuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa adalah:
  - a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan yang dilaksanakan.
  - b. Tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa dan kemauan masyarakat karna mereka sulit untuk dikumpulkan dalam pelatihan.
  - c. Terlalu banyaknya suara masyarakat sehingga sulit untuk disatukan.
2. Kemampuan Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian desa adalah:
  - a. Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  - b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengarahan yang disampaikan Kepala Desa dalam pembinaan tersebut.

- c. Kurangnya data yang akurat mengenai perekonomian masyarakat desa sehingga Kepala Desa kesulitan dalam membina perekonomian tersebut.
- 3. Kemampuan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah:
  - a. Masyarakat hanya mau ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban apabila hanya diberi gaji.
  - b. Masyarakat susah untuk dikumpulkan musyawarah mengenai ketentraman dan ketertiban desa.
  - c. Keluhan-keluhan masyarakat kurang ditanggapi dalam hal keamanan lingkungan.
- 4. Kemampuan Dalam Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa adalah:
  - a. Solusi-solusi yang diberikan kurang diterima oleh pihak yang berselisih.
  - b. Keputusan yang diambil cenderung dipaksakan karena masyarakat yang terlibat perselisihan tidak mau mengalah satu sama lain.
  - c. Sulitnya mengumpulkan masyarakat yang terlibat perselisihan dalam musyawarah untuk menyelesaikannya
- 5. Kemampuan Dalam Menyusun dan Merancang Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD adalah:
  - a. Rendahnya pemahaman Kepala Desa dan anggota BPD dalam menyusun peraturan desa.
  - b. Peraturan desa yang dihasilkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil ke bawah.

- c. Peraturan desa kurang disosialisasikan kepada masyarakat.

## **VI.2. Saran**

Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan.

- a. Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa hendaknya selalu melibatkan elemen masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di Desa.
- b. Kepala Desa dalam pembinaan perekonomian Desa hendaknya selalu memperhatikan masalah perekonomian desa dengan selalu mencariinformasi mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.
- c. Kepala Desa dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban desa hendaknya membentuk satuan keamanan lingkungan dan selalu melibatkan masyarakat dengan memperhatikan keluhan dari masyarakat.
- d. Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa hendaknya selalu mengadakan musyawarah dan berlaku adil kepada setiap pihak yang bertikai.
- e. Kepala Desa dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan BPD hendaknya menyusun peraturan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa dan meminta persetujuan BPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudijdo, Prajudi. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Suharto Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta ; PT Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta ; Pustaka
- Kencana Safi'i, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta ; Raja Grafindo.
- Maryoto, Susilo. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE ; Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta ; Gunung Agung.
- , 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung ; Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Suhartono, 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta ; Laper Pustaka Utama.
- Talizudhuhu, Ndraha, 2005. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Penerbit PT Bumi Aksara ; Jakarta.
- Widjaja, 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005. Tentang Peraturan Desa
- Peraturan Daerah Siak No 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pelaksanaan Pembangunan Fisik Dusun Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	6
Tabel III.1	Populasi dan Sampel-----	31
Tabel IV.1	Luas Wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak-----	34
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak-----	35
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Banjar Semina Menurut Jenis Kelamin di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak-----	36
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Menurut Agama Yang Di Anut -----	37
Tabel IV.5	Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak-----	38
Tabel V.1	Tingkat Pendidikan Desa Sampel Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	46
Tabel V.2	Golongan Umur Atau Usia Responden Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	47
Tabel V.3	Jenis Kelamin Responden Masyarakat Desa Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak-----	48
Tabel V.4	Rekapitulasi Tanggapan responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat ----	51
Tabel V.5	Rekapitulasi Tanggapan responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa -----	55
Tabel V.6	Rekapitulasi Tanggapan responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Desa -----	58
Tabel V.7	Rekapitulasi Tanggapan responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Musyawarah Penyelesaian Perselisihan -----	61
Tabel V.8	Rekapitulasi Tanggapan responden Pada Desa Sampel Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menyusun dan Merancang Peraturan Desa-----	65

Tabel V.9	Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administator Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	69
-----------	---	----



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 . Struktur Organisasi Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	40
GAMBAR 2 . Struktur Organisasi Dusun Banjar Agung Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	43.
GAMBAR 3 . Struktur Organisasi Dusun Banjar Tengah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	44.
GAMBAR 4 . Struktur Organisasi Dusun Suka Jaya Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	45.

## KUESIONER

Kpd Yth:

Bapak/Ibu/Responden.

Di Tempat

Bapak/ibu yang terhormat, dengan ini saya memohon kesediaan dan kerjasamanya untuk mengisi kuesioner dibawah ini.

Dibawah ini ada sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Jawaban yang Bapak/ibu berikan tidak berpengaruh terhadap aktifitas dan instansi tempat kerja Bapak/ibu sekalian, karena kerahasiaan jawaban tetap saya jaga. Ketepatan dan akurat hasil penelitian ini sangat tergantung pada jawaban yang Bapak/ibu berikan. Oleh karena itu saya mohon agar jawaban diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ibu berikan, saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

**Dwi Ratna Ningsih**

## **I. Petunjuk Pengisian**

Dibawah ini ada sejumlah pernyataan tentang Fungsi Kepala Desa sebagai Administator Pembangunan dalam pelaksanaan progam pembangunan desa. Bapak/Ibu diminta untuk menetapkan sikap terhadap pernyataan dalam lima (5) kemungkinan, yaitu:

1. SS - yaitu sangat setuju dengan apa yang tertulis
2. S - yaitu setuju dengan apa yang tertulis
3. R - yaitu ragu-ragu dengan apa yang tertulis
4. KS - yaitu kurang setuju dengan apa yang tertulis
5. STS - yaitu sangat tidak setuju dengan apa yang tertulis

## **II. Identitas Responden**

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda ( x ) pada jawaban berikut ini:

### **1. Jenis kelamin**

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

### **2. Usia Bapak/Ibu**

- a. 15-25 Tahun
- b. 25-30 Tahun
- c. 31-40 Tahun
- d. 40-50 Tahun
- e. > 55 Tahun

### **3. Pendidikan:**

- a. SD/ sederajat
- b. SLTA atau sederajat
- c. Sarjana Muda (D3) Diploma II atau sederajat
- d. Pasca Sarjana/Specialis 1
- e. Lainnya (sebutkan)....

### **4. Pekerjaan:**

- a. Petani
- b. Buruh
- c. Pedagang
- d. PNS

e. Lainnya ( sebutkan )

Nyatakan jawaban Bapak/Ibu dengan memberikan tanda v(Checlist) pada kolom yang sesuai dibawah ini.

### III. Daftar Pernyataan

#### A. Melaksanakan Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa.

NO	Pernyataan	Jawaban dan bobot nilai				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Menurut saya Kepala Desa selalu hadir dalam acara-acara keagamaan.					
2	Menurut saya Kepala Desa telah ikut dalam menggalangkan Progam PKK					
3	Sepengetahuan saya Kepala Desa telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong					
4	Saya bersedia jika diadakan kebersihan lingkungan desa setiap minggu.					
5	Menurut saya Kepala Desa iku melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.					

#### B. Melaksanakan Pembinaan Perekonomian Desa.

NO	Pernyataan	Jawaban dan bobot nilai				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Kepala Desa ikut dalam pengembangan Usaha Ekonomi Desa.					
2	Kepala Desa berperan aktif dalam membuat Surat Izin Usaha					
3	Saya rasa Kepala Desa mengetahui pembukuan keuangan Desa					
4	Menurut saya Kepala Desa selalu mendukung usaha yang dirintis oleh masyarakat					
5	Saya rasa Kepala Desa ikut mengawasi kegiatan simpan pinjam di Desa					

### C. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

NO	Pernyataan	Jawaban dan bobot nilai				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban, Kepala Desa telah membentuk siskamling					
2	Kepala Desa berperan aktif dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa					
3	Menurut saya Kepala Desa telah membuat peraturan-peraturan desa					
4	Kepala Desa bertanggung jawab dalam menjaga keamanan desa					
5	Menurut saya upaya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban desa, sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah					

### D. Melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa

NO	Pernyataan	Jawaban dan bobot nilai				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Menurut saya Kepala Desa mempunyai peraturan-peraturan dalam upaya menyelesaikan permasalahan					
2	Kepala Desa meminta pendapat kepada masyarakat mengenai perselisihan yang terjadi					
3	Menurut saya Kepala Desa turun langsung ke masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan					
4	Saya rasa ketelitian dalam menyelesaikan perselisihan itu sangat penting					
5	Sebelum mengambil keputusan, kepala desa selalu memberikan alternative-alternative penyelesaiannya					

**E. Menyusun Dan Merancang Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD.**

NO	Pernyataan	Jawaban dan bobot nilai				
		SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Menurut saya Kepala Desa ikut merumuskan peraturan Desa bersama BPD					
2	Kepala Desa sering melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD untuk meminta persetujuan rancangan peraturan desa tersebut					
3	Kepala Desa selalu bekerja sama dengan BPD dalam menyusun dan merancang peraturan desa					
4	Kepala Desa selalu meminta saran, persetujuan dan pertimbangan dengan BPD					
5	Kepala Desa dan BPD menampung aspirasi dari masyarakat					

## **DAFTAR WAWACARA**

1. Apa yang Bapak lakukan dalam pembinaan masyarakat desa?
2. Apakah Kepala Desa juga membuat langkah-langkah atau program untuk melaksanakan Pembinaan berupa pengarahan, petunjuk dan saran kepada masyarakat?
3. Apakah Kepala Desa dalam melakukan pembinaan menjelaskan tujuan pembinaan kepada masyarakat?
4. Hal apa saja yang Bapak lakukan dalam melaksanakan pembinaan perekonomian desa?
5. Dalam melaksanakan perekonomian desa, apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa?
6. Apakah menurut Bapak, Kepala Desa mampu melaksanakan pembinaan perekonomian desa?
7. Apakah menurut Bapak. Kepala Desa mampu memelihara ketentraman dan tertib masyarakat desa?
8. Bagaimana cara Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa?
9. Apa yang Bapak lakukan dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa?
10. Dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, adakah Bapak memberikan alternatif-alternatif untuk penyelesaiannya?
11. Apakah yang Bapak lakukan dalam menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD?
12. Apakah Kepala Desa dalam melakukan penyusunan dan merancang peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa?
13. Menurut Bapak, apakah Kepala Desa mampu menyusun dan merancang peraturan tersebut?